CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

PENERAPAN NILAI-NILAI PANCASILA DALAM BIDANG PENDIDIKAN SEBAGAI UPAYA PEMBENTUKAN KARAKTER GENERASI MUDA

Rangga Wijaya[1*], Dikha Prasetyo[2], Angel Puspita Fitri[3], Agus Rifai[4], Habibi[5]
[1-9]Program Studi Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung, Indonesia
Email: ranggawjy256@gmail.com[1*], dikhaprasetyo585@gmail.com[2], angelspuspitafitri320@gmail.com[3], ahunfai@gmail.com[4], habibisinar5@gmail.com[5]

ABSTRAK

Pancasila merupakan dasar negara sekaligus pedoman moral bagi bangsa Indonesia. Dalam dunia pendidikan, nilai-nilai Pancasila menjadi fondasi penting untuk membentuk karakter generasi muda yang beriman, berakhlak, cerdas, dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Melalui penerapan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah dan kampus, peserta didik tidak hanya diajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga nilai-nilai kehidupan seperti gotong royong, kejujuran, dan toleransi. Artikel ini membahas penerapan nilai-nilai Pancasila dalam bidang pendidikan sebagai salah satu langkah strategis untuk membentuk karakter generasi muda yang berjiwa nasionalis dan bermoral luhur.

Kata Kunci: Pancasila, Pendidikan, Karakter, Generasi Muda.

ABSTRACT

Pancasila is the foundation of the state and the moral guideline for the Indonesian people. In education, Pancasila values serve as a crucial foundation for shaping the character of a young generation who are faithful, moral, intelligent, and have a sense of responsibility towards the nation and state. Through the application of Pancasila values in schools and universities, students are taught not only knowledge but also life values such as mutual cooperation, honesty, and tolerance. This article discusses the application of Pancasila values in education as a strategic step in shaping the character of a young generation with a nationalistic spirit and noble morals.

***Keywords**: Pancasila, Education, Character, Young Generation.*

Article History
Received: Januari 2026
Reviewed: Januari 2026
Published: Januari 2026
Plagiarism Checker No 234
Prefix DOI:
10.8734/CAUSA.v1i2.365
Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

PENDAHULUAN

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Pendidikan memiliki peran sentral dalam membentuk kepribadian dan karakter generasi muda sebagai penerus bangsa. Di tengah arus globalisasi yang membawa perubahan sosial dan budaya, nilai-nilai Pancasila sering kali mulai terabaikan. Padahal, Pancasila tidak hanya menjadi simbol negara, melainkan pedoman hidup bangsa Indonesia yang mencerminkan kepribadian dan jati diri nasional.

Secara lebih spesifik, penerapan nilai-nilai Pancasila di lembaga pendidikan bukan sekadar menyisipkan materi Pancasila pada kurikulum, melainkan juga memastikan bahwa seluruh proses pendidikan mencerminkan nilai-nilai tersebut. Ini mencakup perilaku pendidik dan tenaga kependidikan, metode pengajaran yang mendorong dialog dan musyawarah, kebijakan sekolah yang adil, serta kegiatan nyata yang menumbuhkan empati dan gotong royong. Dengan kata lain, Pancasila harus menjadi **ruh** dalam penyelenggaraan pendidikan—bukan sekadar bahan teori yang dibaca, tetapi praktik yang hidup dalam keseharian sekolah dan kampus.

Permasalahan yang sering muncul dalam konteks ini antara lain: (1) kesenjangan antara pengajaran nilai-nilai Pancasila secara formal dan penerapan nilai itu dalam praktik sehari-hari; (2) keterbatasan kapasitas guru dalam mendesain pembelajaran karakter yang kontekstual dan menarik bagi generasi muda; (3) pengaruh lingkungan luar sekolah (media sosial, budaya populer) yang dapat kontraproduktif terhadap nilai-nilai kebangsaan; dan (4) ketimpangan akses pendidikan berkualitas yang membuat penerapan nilai-nilai Pancasila menjadi tidak merata. Permasalahan-permasalahan ini menuntut pendekatan yang sistemik: penguatan kurikulum, peningkatan kompetensi guru, keterlibatan keluarga dan masyarakat, serta kebijakan publik yang mendukung pendidikan karakter.

Tujuan penyusunan tulisan ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat diaktualisasikan dalam praktik pendidikan sebagai upaya pembentukan karakter generasi muda. Secara operasional, tulisan ini bermaksud: (1) mengidentifikasi bentuk-bentuk konkret penerapan tiap sila Pancasila di lingkungan pendidikan; (2) mengkaji hambatan utama dalam proses internalisasi nilai Pancasila di sekolah dan kampus; serta (3) menawarkan rekomendasi praktis yang dapat diterapkan oleh tenaga pendidik, pengelola sekolah, dan pemangku kebijakan pendidikan.

Signifikansi kajian ini bersifat ganda. Secara akademis, tulisan ini berkontribusi pada literatur pendidikan karakter dengan fokus pada implementasi nilai-nilai dasar kebangsaan. Secara praktis, hasil kajian diharapkan memberi masukan bagi guru, kepala sekolah, pengembang kurikulum, dan pembuat kebijakan tentang strategi-strategi yang efektif untuk mengintegrasikan Pancasila ke dalam proses pembelajaran dan kehidupan sekolah sehari-hari. Selain itu, kajian ini juga relevan bagi orang tua dan komunitas sebagai mitra pendidikan yang memiliki peran penting dalam konsolidasi nilai-nilai pada anak.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila dalam bidang pendidikan di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila dapat membentuk karakter generasi muda di lingkungan sekolah maupun perguruan tinggi?
3. Faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat penerapan nilai-nilai Pancasila dalam dunia pendidikan?

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam bidang pendidikan sebagai upaya pembentukan karakter generasi muda di Indonesia.

Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu suatu pendekatan yang berusaha menggambarkan fenomena secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta serta hubungan antarvariabel yang diteliti.

Pendekatan kualitatif dipilih karena topik ini berkaitan erat dengan nilai, moral, dan perilaku sosial yang tidak dapat diukur secara kuantitatif. Fokus utama penelitian ini adalah pada pemahaman makna dan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam konteks pendidikan formal, baik di sekolah dasar, menengah, maupun perguruan tinggi.

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dokumen kebijakan pendidikan, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan nilai-nilai Pancasila dan pendidikan karakter. Sumber-sumber tersebut kemudian dianalisis untuk menemukan pola, tema, dan bentuk penerapan nilai-nilai Pancasila dalam sistem pendidikan nasional. Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu:

1. Reduksi data, yaitu proses memilih dan menyederhanakan data yang relevan dengan tujuan penelitian.
2. Penyajian data, yaitu mengelompokkan informasi ke dalam kategori seperti bentuk penerapan nilai, dampak terhadap karakter siswa, dan faktor penghambat atau pendukung.
3. Penarikan kesimpulan, yaitu merumuskan hasil analisis yang menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian.

Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat diimplementasikan secara nyata dalam dunia pendidikan, serta bagaimana penerapan tersebut berkontribusi terhadap pembentukan karakter generasi muda yang berjiwa nasionalis, religius, dan berakhlak mulia.

HASIL PEMBAHASAN

Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dalam Bidang Pendidikan sebagai Upaya Pembentukan Karakter Generasi Muda

Pendidikan berperan sebagai sarana strategis dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda. Nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila menjadi pedoman moral, sosial, dan spiritual yang harus diinternalisasikan dalam seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan, baik dalam kurikulum, proses pembelajaran, maupun budaya sekolah. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya dipelajari sebagai mata pelajaran, tetapi juga dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari oleh siswa, guru, dan seluruh warga sekolah.

Berikut ini merupakan bentuk penerapan nilai-nilai dari setiap sila Pancasila dalam dunia pendidikan di Indonesia:

1. Sila Pertama – Ketuhanan Yang Maha Esa

memiliki kesukan yang utama dan mendasar dalam sistem nilat Pancasila la bukan hanya sila pertama secara urutan, tetapi пода тегирakan sumber spiritual dan moral bagi sila-sila yang lain Menurut Notomatoro sila ini merupakan causa prima" vukai sebab pertama dan sumber nilai dari seluruls struktur Pancasila Dengan menempatkan Ketuhanan sebagai sila Pertama,

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

bartesa Indonesia menegaskan bahwa kehidupan berbaruesa dan bernegara berakar pada nilai-nilai religius dan spiritualitas tanpa menjadikan Indonesia sebagai negara agama.

Konsep Ketuhanan dalam Pancasila tidak dimaknai semala seara teologis dogmatis melainkan sebagai aspek frawendental yang menjadi ruang nilai bersama berbagai agama dan kepercayaan di Indonesia. Hal ini memberikan fondasi moral universal, yang memadikan negara Indonesia (1) Berbasis pada nilai dahiah (2) Menjunjung tinggi martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan (3) Menjalankan kekuasaan dan hukum atas dasar moral yang luhur. Dengan begitu, Pancasila menjadi ideologi yang religius namun inklusif, bukan sekuler dalam arti perusahan agama dan negara secara total, tetapi juga

bukan teokratis Konsep Ketuhanan dalam Pancasila merupakan hasil dari kompromi historis yang tercapai dalam sidang BPUPKI dan Panitia Sembilan tahun 1945. Dalam Piagam Jakarta, sila pertama awalnya berbunyi "Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya". Namun, demi menjaga persatuan nasional dan mengakomodasi keberagaman agama dan kepercayaan di Indonesia, rumusan

Sila pertama menekankan pentingnya pengakuan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan kebebasan dalam menjalankan keyakinan. Dalam konteks pendidikan, nilai ini diwujudkan melalui kegiatan keagamaan seperti doa bersama sebelum pelajaran dimulai, peringatan hari besar agama, serta pemberian kesempatan kepada setiap peserta didik untuk beribadah sesuai keyakinannya. Selain itu, sekolah juga harus menanamkan nilai toleransi antarumat beragama. Guru memiliki peran sentral dalam memberikan teladan sikap saling menghormati dan tidak memaksakan kehendak kepada pihak lain. Dengan demikian, siswa tidak hanya memahami ajaran agamanya sendiri, tetapi juga belajar menghargai perbedaan. Nilai Ketuhanan ini membentuk karakter siswa yang beriman, berakhlak mulia, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.

2. Sila Kedua – Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Sila kedua dari Pancasila berbunyi: "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab", yang menegaskan bahwa negara Indonesia dibangun atas dasar pengakuan terhadap martabat manusia sebagai makhluk Tuhan yang memiliki nilai dan hak yang melekat sejak lahir. Sila ini menjadi dasar bagi pembangunan tatanan sosial-politik yang menjunjung tinggi keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM).

Menurut filsafat Pancasila, manusia dipandang sebagai makhluk monopluralis, yaitu: makhluk individu dan sosial, makhluk berakal dan berperasaan, serta makhluk spiritual dan material. Maka pengakuan terhadap nilai kemanusiaan bukan hanya dalam bentuk formal, tetapi menyentuh seluruh dimensi manusia sebagai pribadi dan anggota masyarakat. Ini selaras dengan pandangan Soekarno: "Pancasila itu bukan hanya politik, tetapi juga nilai yang menjunjung tinggi kemanusiaan dalam segenap seginya. Tidak ada Pancasila kalau tidak ada kemanusiaan yang adil dan beradab."

Nilai kemanusiaan bersifat universal karena berlaku untuk semua manusia tanpa memandang ras, agama, suku, bahasa, dan status sosial. Namun, Pancasila juga mengajarkan bahwa kemanusiaan harus dimaknai secara kontekstual, yaitu berdasarkan budaya luhur bangsa, dilaksanakan sesuai realitas sosial Indonesia, serta tidak lepas dari nilai Ketuhanan dan gotong royong. Dengan demikian, nilai kemanusiaan dalam Pancasila tidak identik dengan liberalisme individualistik, tetapi mendasarkan kemanusiaan pada nilai spiritual dan kebersamaan.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Sila kedua Pancasila, "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab", merupakan manifestasi dari pandangan hidup bangsa Indonesia yang meletakkan manusia dan kemanusiaan sebagai pusat dari tata sosial dan politik nasional. Sila ini menegaskan bahwa kehidupan bersama dalam bangsa dan negara harus dijalankan atas dasar dua pilar utama, yaitu: Pertama, Keadilan (adil). Kedua, Keberadaban (beradab).

Kedua nilai ini saling melengkapi dan membentuk kerangka etik yang tidak dapat dipisahkan. Nilai "adil" berkaitan dengan struktur dan substansi keadilan sosial, sedangkan nilai "beradab" menyangkut cara dan proses berperilaku secara manusiawi dan bermoral. Dalam konteks kenegaraan, keduanya menjadi pedoman normatif dalam penegakan hukum, penyusunan kebijakan, dan interaksi sosial antarwarga negara.

Keadilan (justice) dalam sila kedua mengacu pada pengertian bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk diperlakukan secara layak dan proporsional, tanpa diskriminasi. Keadilan tidak hanya dimaknai secara yuridis (di depan hukum), tetapi juga secara sosial, ekonomi, dan politik. Konsep keadilan dalam Pancasila bersifat: (1) Distributif, setiap warga negara memperoleh hak dan akses yang adil terhadap pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan kesempatan

Sila kedua menekankan pentingnya menghargai martabat manusia secara adil dan beradab. Penerapannya dalam pendidikan dapat dilihat dari kegiatan pembelajaran yang menumbuhkan empati, kejujuran, dan rasa hormat terhadap sesama. Guru harus menghindari tindakan diskriminatif terhadap siswa, baik berdasarkan latar belakang sosial, ekonomi, agama, maupun etnis.

Kegiatan seperti bakti sosial, penggalangan dana untuk korban bencana, kerja bakti lingkungan, atau program “sekolah ramah anak” merupakan bentuk nyata penerapan sila kedua. Nilai-nilai ini membantu siswa memahami pentingnya kepedulian sosial dan menghormati hak-hak orang lain, sehingga membentuk pribadi yang berperikemanusiaan dan beradab. Nilai kemanusiaan dalam Pancasila bersifat **universal** karena berlaku bagi semua manusia tanpa memandang ras, agama, suku, bahasa, maupun status sosial. Namun demikian, nilai tersebut tidak dimaknai secara liberal atau individualistis seperti dalam ideologi Barat. Pancasila mengajarkan bahwa kemanusiaan harus dipahami secara kontekstual, yaitu berdasarkan budaya luhur bangsa Indonesia dan nilai Ketuhanan, serta dijalankan dengan semangat gotong royong. Dengan begitu, kemanusiaan dalam Pancasila bukanlah sekadar konsep abstrak, melainkan nilai hidup yang berpadu dengan moralitas, spiritualitas, dan kebersamaan sosial.

Sila kedua juga menegaskan bahwa kehidupan bersama dalam masyarakat dan negara harus dilandasi oleh dua prinsip utama, yaitu:

1. Keadilan (adil) – artinya memberikan hak kepada setiap orang secara layak, proporsional, dan tanpa diskriminasi.
2. Keberadaban (beradab) – artinya bertindak dan berperilaku sesuai dengan norma moral, etika, dan nilai-nilai kemanusiaan yang luhur.

Kedua nilai ini saling melengkapi. Nilai adil menekankan pada struktur dan substansi keadilan sosial, sementara beradab menekankan pada sikap, cara, dan proses manusia berinteraksi secara manusiawi. Dalam konteks kenegaraan, nilai-nilai ini menjadi pedoman bagi penyusunan kebijakan, penegakan hukum, dan hubungan antarwarga negara agar tidak ada yang dirugikan atau diperlakukan secara tidak manusiawi.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Dalam praktiknya, keadilan (justice) yang dimaksud dalam sila kedua mencakup beberapa dimensi:

a. Keadilan distributif, yaitu pembagian sumber daya, kesempatan, dan hak yang seimbang bagi seluruh warga negara.
b. Keadilan legal, yaitu kesetaraan semua warga negara di hadapan hukum tanpa membedakan status sosial, ekonomi, atau jabatan.
c. Keadilan sosial, yaitu menciptakan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan masyarakat secara menyeluruh.Dengan penerapan keadilan ini, diharapkan tidak ada lagi kesenjangan sosial, diskriminasi, atau penindasan antarwarga negara.

Sementara itu, nilai beradab menekankan pentingnya perilaku manusia yang sopan, santun, dan berakhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Beradab berarti menghargai perbedaan, menghormati pendapat orang lain, serta menjaga martabat sesama manusia. Dalam dunia pendidikan, misalnya, nilai beradab tercermin dalam sikap saling menghormati antara guru dan siswa, serta menghindari segala bentuk kekerasan, perundungan (bullying), atau diskriminasi.

Penerapan sila kedua dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan dalam berbagai kegiatan nyata, antara lain:

a. Bakti sosial, seperti membantu korban bencana alam, anak yatim, atau masyarakat kurang mampu.
b. Kerja bakti lingkungan, membersihkan tempat umum sebagai wujud kepedulian sosial.
c. Program “sekolah ramah anak”, yang menumbuhkan empati, saling menghargai, dan kejujuran di lingkungan pendidikan.
d. Kegiatan gotong royong dan toleransi antarumat beragama, yang memperkuat solidaritas sosial dan memperkecil konflik antar kelompok.

Dengan demikian, Sila Kedua Pancasila merupakan manifestasi dari pandangan hidup bangsa Indonesia yang meletakkan manusia dan kemanusiaan sebagai pusat dari tata kehidupan sosial, politik, dan kebudayaan nasional. Penerapan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab akan menciptakan masyarakat yang saling menghargai, berkeadilan, dan berkepribadian luhur sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.

3. Sila Ketiga – Persatuan Indonesia

Persatuan merupakan pilar eksistensial Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tanpa persatuan, Indonesia sebagai negara dengan ribuan pulau, ratusan suku, bahasa, dan agama akan mudah terpecah. Karena itu, pendiri bangsa menyadari bahwa untuk menjaga eksistensi dan kesinambungan bangsa Indonesia, konsep persatuan harus diletakkan sebagai nilai dasar dan fundamental.

Sila Ketiga "Persatuan Indonesia" mencerminkan nilai dasar nasionalisme, patriotisme, dan semangat kebangsaan yang menyatukan seluruh rakyat Indonesia dalam satu kesatuan bangsa dan negara. Persatuan bukan sekadar integrasi geografis, tetapi lebih dari itu: integrasi budaya, sosial, politik, dan spiritual berdasarkan prinsip kebangsaan yang inklusif dan berkeadilan. Menurut Notonagoro, sila ini menuntut setiap warga negara untuk menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi maupun golongan, serta menumbuhkan rasa cinta tanah air.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Secara filosofis, persatuan dalam Pancasila tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan erat dengan nilai-nilai kemanusiaan (sila kedua) dan keadilan sosial (sila kelima). Persatuan tidak bersifat koersif, melainkan lahir dari kesadaran akan kemanusiaan dan rasa keadilan dalam kehidupan bersama. Selain itu, Indonesia memiliki tradisi dan falsafah lokal yang menekankan pentingnya kebersamaan dan harmoni, seperti:
a) Gotong royong dalam masyarakat Jawa,
b) Musyawarah dalam budaya Minangkabau,
c) Pi'il Pesenggiri dalam budaya Lampung,
d) Siri' na Pacce di Sulawesi Selatan.

Semua ini menunjukkan bahwa nilai persatuan telah mengakar dalam identitas budaya bangsa sebelum dirumuskan secara formal dalam Pancasila. Falsafah budaya lokal Indonesia menjunjung tinggi harmoni dan persatuan, sehingga Pancasila tidak bersifat asing, melainkan otentik dan kontekstual. Dalam konteks etika sosial dan politik, nilai persatuan menjadi landasan bagi pembentukan etika publik yang inklusif dan berorientasi pada kohesi sosial. Persatuan menuntut setiap warga negara untuk menghindari sikap egoistik, sektarian, atau eksklusif yang dapat memecah belah masyarakat. Dengan kata lain, persatuan bukan hanya doktrin politik, tetapi juga etika hidup bersama yang menciptakan ruang damai dan saling menghargai. Sila ketiga menanamkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air. Dalam dunia pendidikan, penerapan nilai ini dilakukan melalui kegiatan seperti upacara bendera, pembelajaran sejarah perjuangan bangsa, lomba kebangsaan, dan kegiatan bela negara.

Guru juga memiliki tanggung jawab untuk menumbuhkan semangat kebersamaan dan solidaritas di antara siswa dari berbagai latar belakang. Dengan mengajarkan pentingnya semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*, sekolah membantu siswa memahami bahwa perbedaan bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan kekuatan untuk bersatu. Penerapan nilai persatuan di sekolah membentuk karakter siswa yang memiliki semangat nasionalisme tinggi, bangga sebagai bangsa Indonesia, dan siap menjaga keutuhan NKRI.

nilai persatuan juga bersumber dari falsafah dan budaya lokal Indonesia yang telah hidup jauh sebelum Pancasila dirumuskan. Setiap daerah di Nusantara memiliki kearifan lokal yang menekankan pentingnya kebersamaan dan harmoni sosial, seperti: a) *Gotong royong* dalam masyarakat Jawa, yang menekankan kerja sama demi kepentingan bersama. b) *Musyawarah mufakat* dalam budaya Minangkabau, yang menumbuhkan semangat kebersamaan dalam mengambil keputusan. c) *Pi'il Pesenggiri* dalam budaya Lampung, yang menjunjung tinggi harga diri, saling menghormati, dan solidaritas antarindividu. d) *Siri' na Pacce* di Sulawesi Selatan, yang berarti rasa malu dan empati terhadap penderitaan orang lain, sebagai dasar kehormatan dan solidaritas sosial.

Nilai-nilai luhur ini menunjukkan bahwa persatuan sudah menjadi karakter asli bangsa Indonesia, bukan konsep yang diimpor dari luar. Pancasila hanya memperkuat dan memformalkan nilai-nilai yang telah ada tersebut agar menjadi pedoman nasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam konteks etika sosial dan politik, persatuan Indonesia menjadi dasar pembentukan etika publik yang inklusif, yaitu sikap terbuka terhadap perbedaan dan penolakan terhadap segala bentuk fanatisme, egoisme, atau sektarianisme. Persatuan tidak berarti menghapus perbedaan, tetapi mengelola perbedaan menjadi kekuatan. Karena itu, semboyan "Bhinneka Tunggal Ika"—yang berarti *berbeda-beda tetapi tetap satu*—menjadi perwujudan konkret dari nilai sila ketiga.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Persatuan juga memiliki makna dinamis, artinya harus terus dijaga, diperkuat, dan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Tantangan terhadap persatuan bangsa di era modern tidak hanya berupa konflik antar suku atau agama, tetapi juga muncul dalam bentuk disintegrasi digital, polarisasi politik, dan hoaks di media sosial. Dalam kondisi ini, semangat persatuan harus ditanamkan kembali melalui pendidikan, media, dan keteladanan sosial agar masyarakat tidak mudah terpecah oleh perbedaan pendapat atau ideologi.

Dalam dunia pendidikan, penerapan nilai persatuan dapat diwujudkan melalui berbagai kegiatan, seperti:

a. Upacara bendera setiap minggu yang menumbuhkan rasa cinta tanah air dan penghormatan terhadap simbol negara.
b. Pembelajaran sejarah perjuangan bangsa, agar siswa memahami betapa berat perjuangan para pahlawan dalam menyatukan Indonesia.
c. Lomba kebangsaan dan bela negara, untuk menumbuhkan jiwa patriotisme dan kebanggaan nasional.
d. Kegiatan lintas budaya dan lintas agama, yang mengajarkan toleransi dan solidaritas di kalangan pelajar.

Guru memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai-nilai persatuan di lingkungan sekolah. Dengan menumbuhkan sikap saling menghargai antar siswa dari berbagai latar belakang sosial, ekonomi, maupun agama, guru berperan membentuk generasi yang berpikiran terbuka dan berjiwa nasionalis.
Pendidikan harus menjadi ruang di mana semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” benar-benar dihidupkan, sehingga siswa memahami bahwa perbedaan bukan alasan untuk berpecah, tetapi kekuatan untuk bersatu.

Dengan demikian, Sila Ketiga – Persatuan Indonesia bukan hanya semboyan atau doktrin politik, melainkan roh kehidupan berbangsa dan bernegara. Sila ini menuntun bangsa Indonesia untuk terus menjaga keutuhan NKRI, memperkuat solidaritas nasional, dan menanamkan kesadaran bahwa bangsa ini hanya akan kuat jika seluruh warganya bersatu dalam semangat kebangsaan, keadilan, dan kemanusiaan.

4. Sila Keempat – Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Sila Keempat Pancasila menekankan prinsip dasar demokrasi Indonesia yang berakar dari nilai-nilai budaya bangsa, bukan demokrasi liberal atau populis sebagaimana diterapkan di Barat. Inti dari sila ini adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat secara beradab dan bijaksana, melalui musyawarah dan perwakilan yang mencerminkan keadilan dan keterwakilan seluruh rakyat.

Menurut Kaelan, sila ini mengandung gagasan bahwa demokrasi Indonesia harus menjunjung tinggi moralitas, kebijaksanaan, dan semangat kolektif untuk mencapai mufakat. Demokrasi Pancasila berbeda dari demokrasi mayoritarian yang hanya mengandalkan suara terbanyak. Demokrasi dalam Pancasila adalah demokrasi etis, bukan sekadar prosedural. la menekankan kebajikan, musyawarah, dan tanggung jawab.

Keempat Pancasila yang "Hikmat kebijaksanaan" adalah frasa kunci dalam Sila ng menunjukkan bahwa kekuasaan harus berlandaskan kebijaksanaan, akal sehat, moralitas, dan dan pengambilan keputusan dalam kehidupan bernegara kesadaran etis. Kata "hikmat" berasal dari akar kata Arab hikmah yang berarti kebijaksanaan yang bersumber dari akal dan hati nurani, bukan sekadar kecerdasan rasional. melainkan kecerdasan moral dan spiritual.

Menurut Franz Magnis-Suseno, hikmat kebijaksanaan dalam Pancasila berarti bahwa segala keputusan harus mengandung pertimbangan etis yang matang, tidak terburu-buru atau emosional, serta dilandasi oleh niat baik dan rasionalitas moral. Kebijaksanaan adalah bentuk tertinggi dari akal budi yang tahu kapan harus tegas, kapan harus menahan diri.

Sila keempat mencerminkan prinsip demokrasi dan partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan. Dalam pendidikan, nilai ini dapat diterapkan melalui kegiatan musyawarah kelas, pemilihan ketua OSIS, BEM, atau forum diskusi antar siswa.

Melalui kegiatan tersebut, peserta didik belajar menghargai pendapat orang lain, bersikap terbuka terhadap perbedaan pandangan, dan mencari keputusan yang adil berdasarkan mufakat. Guru juga dapat menerapkan nilai demokrasi ini di kelas dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan pendapat atau gagasan dalam proses belajar.

Nilai ini sangat penting dalam membentuk karakter generasi muda yang demokratis, bertanggung jawab, dan memiliki kemampuan berpikir kritis dalam menyelesaikan masalah secara bijak.

5. Sila Kelima – Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Sila kelima dari Pancasila mengandung makna bahwa negara Indonesia bertekad mewujudkan keadilan dalam seluruh aspek kehidupan bersama, baik dalam bidang ekonomi, hukum, sosial, politik, budaya, maupun lingkungan. Tujuan dari keadilan ini adalah untuk menjamin kesejahteraan yang merata, melindungi hak-hak rakyat, serta menjamin keseimbangan, antara hak dan kewajiban setiap warga negara. Sila mi individu, tetapi juga aktif menciptakan tatanan kehidupan sosial menegaskan bahwa negara bukan hanya melindungi kebebasan yang adil, manusiawi dan berkeadaban, dengan memperhatikan kelompok yang lemah dan termarjinalkan.

Secara filosofis, keadilan sosial dalam Pancasila berpijak pada nilai-nilai luhur bangsa Indonesia dan ajaran agama yang menekankan tanggung jawab bersama terhadap sesama gotong royong sebagai ekspresi keadilan fungsional, serta anti-manusia keseimbangan antara individu dan masyarakat. eksploitasi dan anti-ketimpangan dalam bentuk apapun. Sila kelima bukan hanya berbicara tentang keadilan antarindividu, tetapi menyasar struktur sosial dan kebijakan negara. Ini berarti negara harus mengatur sistem ekonomi yang adil, menghapuskan struktur ketimpangan, menjamin akses setara terhadap sumber daya, serta membangun sistem hukum yang melindungi semua warga.

Makna paling hakiki dari sila kelima adalah penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Negara wajib memastikan bahwa semua warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Tidak ada warga negara yang dibiarkan hidup dalam kemiskinan, ketertindasan, atau keterasingan. Dan keadilan sosial menjelma dalam bentuk kebijakan afirmatif bagi kelompok rentan, seperti fakir miskin, penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan daerah tertinggal

Sila kelima menekankan pada prinsip pemerataan dan keadilan dalam seluruh aspek kehidupan. Di bidang pendidikan, nilai ini dapat diwujudkan melalui kesetaraan akses pendidikan bagi seluruh peserta didik tanpa diskriminasi.

Pemerintah maupun lembaga pendidikan harus memastikan bahwa setiap anak, baik yang berasal dari keluarga mampu maupun kurang mampu, memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan berkualitas. Program seperti bantuan pendidikan, beasiswa, dan sekolah inklusif merupakan bentuk nyata penerapan sila kelima dalam dunia pendidikan.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Selain itu, guru juga harus memperlakukan semua siswa secara adil, tidak membeda-bedakan dalam penilaian atau perlakuan di kelas. Dengan begitu, nilai keadilan sosial benar-benar terasa dalam lingkungan sekolah dan menjadi bagian dari karakter siswa sehari-hari.

Peran Guru dan Lembaga Pendidikan dalam Menanamkan Nilai Pancasila

Guru memiliki peranan kunci dalam membumikan nilai-nilai Pancasila kepada peserta didik. Sebagai sosok teladan, guru bukan hanya mengajarkan teori di kelas, tetapi juga menjadi contoh nyata dalam sikap, tutur kata, dan perilaku sehari-hari. Keteladanan guru akan menumbuhkan kepercayaan dan rasa hormat dari siswa, yang pada akhirnya mendorong mereka untuk meniru nilai-nilai positif yang diajarkan. Misalnya, guru yang disiplin, adil dalam menilai, menghargai pendapat siswa, serta mampu bersikap sabar dalam menghadapi perbedaan, secara tidak langsung sedang mengajarkan Pancasila dalam bentuk nyata.

Selain guru, lembaga pendidikan juga memiliki tanggung jawab besar untuk menciptakan budaya sekolah yang berlandaskan Pancasila. Hal ini bisa diwujudkan melalui kegiatan gotong royong, lomba kebersihan antar kelas, program peduli lingkungan, dan kegiatan sosial di luar sekolah. Kegiatan-kegiatan semacam itu menanamkan nilai kebersamaan, tanggung jawab, serta kepedulian sosial yang menjadi cerminan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi fondasi utama dalam membangun moralitas peserta didik. Sekolah memiliki tanggung jawab untuk menanamkan nilai religiusitas dan keimanan melalui kegiatan keagamaan seperti doa bersama sebelum pelajaran, pelaksanaan ibadah sesuai agama masing-masing, serta penghormatan terhadap perbedaan keyakinan. Penerapan nilai Ketuhanan tidak berhenti pada rutinitas seremonial semata, melainkan juga pada pembiasaan sikap toleransi antarumat beragama dan penghormatan terhadap hak kebebasan beragama. Guru sebagai panutan harus menunjukkan perilaku religius, jujur, dan rendah hati agar menjadi teladan bagi peserta didik dalam menerapkan nilai Ketuhanan di kehidupan sehari-hari.

Selanjutnya, nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab diwujudkan melalui penanaman sikap empati, saling menghormati, dan kejujuran dalam lingkungan pendidikan. Setiap siswa diajarkan untuk memperlakukan teman, guru, maupun masyarakat dengan adil tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, agama, atau budaya. Sekolah juga perlu menciptakan suasana yang inklusif dan ramah terhadap semua peserta didik, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Melalui kegiatan sosial seperti bakti masyarakat, donasi kemanusiaan, atau gotong royong membersihkan lingkungan sekolah, siswa belajar untuk peduli dan memahami nilai kemanusiaan secara nyata. Nilai ini memperkuat karakter siswa agar memiliki rasa empati dan kepekaan sosial yang tinggi.

Penerapan sila ketiga, Persatuan Indonesia, memiliki peran penting dalam memperkuat semangat kebangsaan dan cinta tanah air di kalangan siswa. Sekolah menjadi tempat strategis untuk menanamkan rasa bangga sebagai warga negara Indonesia melalui kegiatan seperti upacara bendera, peringatan hari nasional, pembelajaran sejarah perjuangan bangsa, dan lomba-lomba bertema nasionalisme. Guru juga memiliki peran besar dalam mengajarkan pentingnya semangat Bhinneka Tunggal Ika agar siswa memahami bahwa perbedaan suku, agama, ras, dan budaya bukanlah pemisah, melainkan kekuatan yang memperkaya persatuan bangsa. Penerapan nilai persatuan dalam pendidikan dapat membentuk generasi muda yang memiliki loyalitas, cinta tanah air, serta kesadaran menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

1. Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa (Sila Pertama)

Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi fondasi moral dan spiritual dalam pendidikan nasional. Sekolah memiliki tanggung jawab menanamkan nilai religiusitas, keimanan, dan moralitas peserta didik agar mereka tumbuh menjadi manusia berkarakter dan berakhlak mulia. Kegiatan keagamaan seperti doa bersama sebelum belajar, pelaksanaan ibadah sesuai agama masing-masing, dan peringatan hari besar keagamaan dapat memperkuat rasa spiritualitas dan toleransi antarumat beragama.

Namun, penerapan nilai Ketuhanan tidak berhenti pada ritual keagamaan formal saja, melainkan juga harus tercermin dalam perilaku sehari-hari: menghormati perbedaan keyakinan, menolong sesama tanpa memandang agama, serta menjauhi sikap intoleran dan diskriminatif. Guru berperan sebagai panutan moral, menunjukkan sikap rendah hati, jujur, dan beriman, sehingga siswa belajar nilai Ketuhanan bukan hanya dari teori, tetapi dari keteladanan yang mereka saksikan langsung.

2. Nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab (Sila Kedua)

Penerapan nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dalam pendidikan dilakukan melalui penanaman empati, rasa hormat, dan keadilan terhadap sesama. Setiap siswa diajarkan untuk memperlakukan orang lain dengan adil dan berperikemanusiaan, tanpa membeda-bedakan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, maupun agama. Guru harus menjadi figur yang tidak diskriminatif, menghargai setiap siswa secara proporsional sesuai kemampuan dan keunikannya.

Sekolah juga perlu menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, di mana semua peserta didik merasa diterima dan dihargai, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Kegiatan seperti bakti sosial, donasi untuk korban bencana, kunjungan ke panti asuhan, atau program peduli lingkungan dapat menanamkan rasa empati dan kepedulian sosial yang tinggi. Melalui kegiatan tersebut, siswa belajar memahami makna kemanusiaan secara konkret—bahwa keadilan dan keberadaban bukan hanya teori, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata sehari-hari.

3. Nilai Persatuan Indonesia (Sila Ketiga)

Sila Persatuan Indonesia menekankan pentingnya menjaga keutuhan bangsa dan rasa cinta tanah air. Sekolah merupakan tempat strategis untuk menanamkan nasionalisme dan patriotisme melalui berbagai kegiatan, seperti upacara bendera, peringatan hari besar nasional, lomba bertema kebangsaan, dan pembelajaran sejarah perjuangan bangsa. Kegiatan ini menumbuhkan rasa bangga sebagai warga negara Indonesia dan kesadaran akan perjuangan para pahlawan yang telah mengorbankan segalanya demi kemerdekaan.

Selain itu, guru harus menanamkan semangat Bhinneka Tunggal Ika, agar siswa memahami bahwa perbedaan suku, agama, ras, dan budaya bukan alasan untuk berpecah, tetapi justru menjadi kekuatan pemersatu bangsa. Pembelajaran berbasis toleransi dan kerja sama antarsiswa dari berbagai latar belakang juga memperkuat kohesi sosial di sekolah. Dengan begitu, peserta didik tumbuh menjadi generasi yang memiliki loyalitas nasional, kebanggaan terhadap Indonesia, serta komitmen menjaga keutuhan NKRI.

4. Nilai Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan (Sila Keempat)

Nilai kerakyatan dan musyawarah dapat diterapkan di sekolah melalui kegiatan organisasi siswa, seperti OSIS, pramuka, dan ekstrakurikuler lainnya. Dalam organisasi tersebut, siswa belajar berdiskusi, bermusyawarah, mengambil keputusan bersama, dan menghargai

perbedaan pendapat. Guru berperan membimbing agar proses musyawarah berjalan dengan bijaksana, tidak didominasi oleh satu pihak, serta mengedepankan kepentingan bersama.

Selain itu, pembelajaran demokratis di kelas — misalnya melalui diskusi kelompok, debat, dan voting dalam pengambilan keputusan — juga mengajarkan siswa tentang pentingnya keterlibatan aktif dan tanggung jawab bersama dalam kehidupan sosial. Dengan cara ini, nilai demokrasi yang sehat dan beretika dapat tumbuh sejak dini.

5. Nilai Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia (Sila Kelima)

Sila kelima menekankan pentingnya keadilan dalam berbagai aspek kehidupan — sosial, ekonomi, maupun pendidikan. Dalam konteks sekolah, penerapan nilai keadilan sosial berarti memberi kesempatan belajar yang setara kepada semua peserta didik tanpa diskriminasi. Guru harus adil dalam memberikan penilaian, membagi perhatian, dan memperlakukan semua siswa dengan proporsional.

Program-program seperti bantuan bagi siswa kurang mampu, pembelajaran tambahan gratis, serta sistem penghargaan berbasis prestasi dan karakter, merupakan bentuk nyata penerapan nilai keadilan sosial. Sekolah juga harus mengajarkan siswa untuk berbagi, menghormati hak orang lain, dan menolak ketidakadilan, agar terbentuk generasi yang peduli dan bertanggung jawab terhadap kesejahteraan bersama.

KESIMPULAN

Pancasila sebagai dasar negara, ideologi nasional, dan pandangan hidup bangsa Indonesia merupakan fondasi utama dalam membentuk kepribadian dan karakter warga negara yang ideal. Dalam konteks globalisasi dan transformasi sosial yang kian cepat, nilai-nilai Pancasila dihadapkan pada tantangan serius berupa krisis identitas, degradasi moral, serta menguatnya ideologi transnasional yang tidak selalu sejalan dengan nilai-nilai luhur bangsa. Oleh karena pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan tidak hanya penting, tetapi juga mendesak untuk kembali diteguhkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. itu,

Selain itu, konsep kewarganegaraan (civic education) juga mengalami dinamika yang semakin kompleks seiring dengan perubahan global, kemajuan teknologi informasi, serta derasnya arus budaya asing yang masuk tanpa filter. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran terhadap melemahnya semangat nasionalisme, lunturnya rasa tanggung jawab sosial, serta menguatnya paham individualisme yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Maka, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan hadir sebagai wahana penting dalam membentuk karakter warga negara yang cerdas, kritis, partisipatif, dan berlandaskan nilai kebangsaan.

Pendidikan kewarganegaraan tidak hanya mengajarkan tentang hak dan kewajiban warga negara, tetapi juga menanamkan rasa cinta tanah air, sikap demokratis, penghargaan terhadap nilai Pancasila yang menempatkan manusia sebagai makhluk sosial perbedaan, dan kesadaran hukum. Semua ini sejalan dengan nilai secara digital, pendidikan kewarganegaraan berbasis nilai menjadi sekaligus makhluk Tuhan. Dalam dunia yang semakin terhubung benteng utama bagi generasi muda agar tidak tergerus oleh arus globalisasi yang bersifat pragmatis dan materialistik.

Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam bidang pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam membentuk karakter generasi muda Indonesia yang berakhlak, beretika, dan memiliki semangat kebangsaan. Pendidikan bukan sekadar proses transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga wahana pembinaan moral, sikap, dan perilaku sesuai nilai-nilai luhur bangsa. Melalui pengintegrasian nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial ke

dalam sistem pendidikan, sekolah dapat menumbuhkan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara emosional dan spiritual.

Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa membentuk landasan moral dan spiritual peserta didik agar memiliki kesadaran beragama dan menghormati perbedaan keyakinan. Nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab mengajarkan pentingnya empati, kejujuran, dan sikap saling menghormati antar sesama. Nilai Persatuan Indonesia menumbuhkan rasa cinta tanah air serta kebanggaan terhadap identitas nasional di tengah keberagaman. Nilai Kerakyatan menanamkan semangat demokrasi, musyawarah, dan tanggung jawab sosial, sementara nilai Keadilan Sosial membentuk sikap adil dan peduli terhadap kesejahteraan bersama.

Namun, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti pengaruh globalisasi, degradasi moral, dan lemahnya keteladanan di lingkungan sosial. Oleh karena itu, peran guru, keluarga, masyarakat, dan pemerintah sangat dibutuhkan untuk memperkuat pendidikan karakter berbasis Pancasila secara menyeluruh. Sekolah harus menjadi ruang pembiasaan nilai positif, guru harus menjadi teladan yang hidup, dan kebijakan pendidikan harus konsisten menempatkan Pancasila sebagai fondasi utama sistem pendidikan nasional.

Dengan penerapan yang berkesinambungan dan komprehensif, nilai-nilai Pancasila akan terus hidup dalam diri peserta didik. Mereka akan tumbuh menjadi generasi muda yang tidak hanya unggul dalam pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga berkarakter kuat, berjiwa sosial, serta memiliki integritas dan semangat kebangsaan yang tinggi. Melalui pendidikan yang berlandaskan Pancasila, Indonesia dapat membangun masa depan yang berkeadilan, berkepribadian, dan bermartabat sesuai cita-cita luhur bangsa.

Penerapan nilai-nilai Pancasila di bidang pendidikan pada akhirnya bukan hanya tanggung jawab lembaga pendidikan semata, melainkan juga seluruh elemen bangsa. Setiap individu — mulai dari guru, siswa, orang tua, hingga masyarakat luas — memiliki peran penting dalam menjaga dan menumbuhkan nilai-nilai luhur tersebut. Pendidikan harus mampu menjadi jembatan antara pemahaman ideologis dan praktik nyata di kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, penerapan nilai-nilai Pancasila bukan sekadar wacana atau materi pelajaran, tetapi menjadi pedoman hidup yang menuntun generasi muda untuk berpikir, bersikap, dan bertindak sesuai jati diri bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Aini, N., & Nurjanah, S. (2021). *Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Dunia Pendidikan di Era Globalisasi*. Jurnal Pendidikan Karakter, 11(2), 145–156.

Kemendikbud. (2020). *Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) sebagai Implementasi Nilai-Nilai Pancasila di Sekolah*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Lestari, D. (2022). *Peran Guru dalam Membentuk Karakter Siswa Berbasis Nilai-Nilai Pancasila*. Jurnal Ilmu Pendidikan, 8(1), 34–42.

Mulyasa, E. (2019). *Manajemen Pendidikan Karakter*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Ningsih, R., & Hidayat, A. (2020). *Pendidikan Karakter dalam Perspektif Pancasila*. Jurnal Filsafat dan Pendidikan, 5(3), 201–210.

Pusat Penguatan Karakter. (2021). *Panduan Penguatan Profil Pelajar Pancasila*. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Suparlan. (2018). *Pendidikan Berbasis Nilai untuk Membentuk Karakter Bangsa*. Yogyakarta: Deepublish.

Wibowo, A. (2023). *Penerapan Nilai-Nilai Pancasila di Lingkungan Sekolah dan Perguruan Tinggi*. Jurnal Pendidikan Nasional, 12(4), 223–234.

Zainudin, Hasan. 2025. *Pancasila dan Kewarnegaraan*. CV. Alinea Edumedia